



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 587/KPTS/M/2018
TENTANG
BESARAN NILAI DAN LOKASI
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/ PRT/ M / 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian antara kebutuhan dari penerima bantuan dengan lokasi bantuan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/ PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BESARAN NILAI DAN LOKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan besaran nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya disebut Nilai BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan kabupaten/kota penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya disebut Lokasi BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Nilai BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Lokasi BSPS untuk jenis kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan
- b. Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

KEEMPAT : Lokasi BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi usulan pemerintah daerah dengan memprioritaskan:

- a. tingkat kemiskinan kabupaten/kota;
- b. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di kabupaten/kota;
- c. proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota;
- d. kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan
- e. program prioritas Pemerintah Pusat.

KELIMA : Lokasi BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan untuk:

- a. pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk mendukung program Padat Karya sebagai perintah langsung Presiden;

- b. pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk mendukung program prioritas Pemerintah Pusat; dan
- c. pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya usulan dari pemerintah daerah provinsi dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Gubernur Daerah Lokasi BPS Tahun 2018;
2. Para Bupati/Walikota Lokasi penerima BPS Tahun 2018;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
5. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
6. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
7. Direktur Rumah Swadaya;
8. Para Kepala Satuan Kerja Penyelenggara BPS; dan
9. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Penyelenggara BPS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 587 /KPTS/M/2018
TENTANG
BESARAN NILAI DAN LOKASI BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2018

NILAI BSPS

A. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

NO	BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	TOTAL
1.	Rp. 12.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 15.000.000,00

C. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Khusus Wilayah Pesisir dan Pegunungan
Provinsi Papua dan Papua Barat.

NO	BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 30.000.000,00

E. Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

NO	BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	TOTAL
1.	Rp. 25.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 30.000.000,00

G. Pembangunan Baru Rumah Swadaya Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

NO	BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	TOTAL
1.	Rp. 50.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 60.000.000,00

I. Pembangunan Baru Rumah Swadaya Khusus Kabupaten Asmat.

NO	BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	TOTAL
1.	Rp. 40.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 60.000.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 587 /KPTS/M/2018
TENTANG
BESARAN NILAI DAN LOKASI BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2018

LOKASI BSPTS

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	ACEH	
		1 KAB. GAYO LUES
		2 KAB. ACEH SELATAN
		3 KAB. NAGAN RAYA
		4 KAB. ACEH BARAT DAYA
		5 KAB. ACEH TAMIANG
		6 KAB. ACEH TENGAH
		7 KAB. ACEH TIMUR
		8 KAB. BENER MERIAH
		9 KAB. BIREUN
		10 KOTA LANGSA
		11 KAB. ACEH TENGGARA
		12 KAB. ACEH BESAR
		13 KAB. PIDIE
		14 KAB. ACEH UTARA
		15 KOTA LHOKSEUMAWE
		16 KOTA BANDA ACEH
2	SUMATERA UTARA	
		1 KAB. DAIRI
		2 KOTA TEBING TINGGI
		3 KAB. SIMALUNGUN
		4 KAB. NIAS SELATAN
		5 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
		6 KAB. TAPANULI UTARA
		7 KAB. TOBA SAMOSIR
		8 KAB. NIAS BARAT
		9 KAB. TAPANULI SELATAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		10	KOTA MEDAN
		11	KAB. MANDAILING NATAL
		12	KAB. SERDANG BERDAGAI
		13	KAB. ASAHAN
		14	KAB. DELI SERDANG
		15	KAB. LABUHAN BATU
		16	KAB. LABUHAN BATU SELATAN
		17	KOTA SIBOLGA
		18	KAB. PADANG LAWAS
		19	KAB. SAMOSIR
		20	KAB. KARO
		21	KAB. LANGKAT
3	RIAU		
		1	KAB. ROKAN HULU
		2	KOTA DUMAI
		3	KOTA PEKAN BARU
		4	KAB. INDRAGIRI HULU
		5	KAB. KUANTAN SINGINGI
		6	KAB. BENGKALIS
		7	KAB. ROKAN HILIR
		8	KAB. SIAK
		9	KAB. KAMPAR
		10	KAB. PELALAWAN
		11	KAB. KEP. MERANTI
		12	KAB. INDRAGIRI HILIR
4	KEPULAUAN RIAU		
		1	KAB. BINTAN
		2	KOTA BATAM
		3	KOTA TANJUNG PINANG
		4	KAB. KARIMUN
		5	KAB. LINGGA
5	SUMATERA BARAT		
		1	KAB. SOLOK
		2	KAB. PESISIR SELATAN
		3	KAB. DHARMASRAYA

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		4	KAB. LIMA PULUH KOTA
		5	KOTA PARIAMAN
		6	KOTA PADANG
		7	KAB. PADANG PARIAMAN
		8	KAB. PASAMAN
		9	KOTA BUKIT TINGGI
		10	KAB. SIJUNJUNG
		11	KAB.KEP. MENTAWAI
		12	KAB. TANAH DATAR
		13	KOTA SAWAH LUNTO
		14	KAB. ADAM
		15	KAB. SOLOK SELATAN
		16	KAB. PASAMAN BARAT
6	JAMBI	1	KAB. BATANGHARI
		2	KAB. MERANGIN
		3	KAB. MUARO JAMBI
		4	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
		5	KAB. KERINCI
		6	KAB. BUNGO
		7	KAB. SAROLANGUN
		8	KOTA JAMBI
		9	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
		10	KAB. TEBO
		11	KOTA SUNGAI PENUH
7	SUMATERA SELATAN	1	KAB. MUSI RAWAS
		2	KAB. BANYUASIN
		3	KOTA PAGAR ALAM
		4	KOTA PRABUMULIH
		5	KAB. MUSI BANYUASIN
		6	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
		7	KOTA LUBUK LINGGAU
		8	KOTA PALEMBANG
		9	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		10	KAB. OGAN KOMERING ULU
		11	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
		12	KAB. MUARA ENIM
		13	KAB. EMPAT LAWANG
		14	KAB. OGAN KOMERING ILIR
		15	KAB. OGAN ILIR
		16	KAB. MUSI RAWAS UTARA
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
		1	KAB. BANGKA
		2	KAB. BANGKA SELATAN
		3	KAB. BANGKA BARAT
		4	KAB. BANGKA TENGAH
		5	KAB. BELITUNG TIMUR
9	BENGKULU		
		1	KAB. LEBONG
		2	KAB. KAUR
		3	KAB. BENGKULU TENGAH
		4	KAB. REJANG LEBONG
		5	KAB. BENGKULU UTARA
		6	KAB. MUKOMUKO
		7	KOTA BENGKULU
		8	KAB. SELUMA
		9	KAB. BENGKULU SELATAN
		10	KAB. KEPAHANG
10	LAMPUNG		
		1	KAB. LAMPUNG SELATAN
		2	KAB. LAMPUNG UTARA
		3	KAB. LAMPUNG TENGAH
		4	KAB. PRINGSEWU
		5	KAB. WAY KANAN
		6	KAB. PESAWARAN
		7	KAB. TANGGAMUS
		8	KAB. LAMPUNG TIMUR
		9	KAB. TULANG BAWANG BARAT
		10	KAB. MESUJI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		11	KAB. PESISIR BARAT
		12	KAB. TULANG BAWANG
11	BANTEN	1	KOTA SERANG
		2	KAB. PANDEGLANG
		3	KAB. SERANG
		4	KOTA CILEGON
		5	KAB. TANGERANG
		6	KOTA TANGERANG
		7	KOTA TANGERANG SELATAN
		8	KAB LEBAK
12	JAWA BARAT	1	KAB. CIAMIS
		2	KAB. KUNINGAN
		3	KAB. SUBANG
		4	KAB. TASIKMALAYA
		5	KAB. INDRAMAYU
		6	KAB. BANDUNG BARAT
		7	KAB. PANGANDARAN
		8	KAB. SUMEDANG
		9	KAB. MAJALENGKA
		10	KOTA CIMAHI
		11	KAB. BEKASI
		12	KAB. BOGOR
		13	KOTA BOGOR
		14	KOTA CIREBON
		15	KAB. CIANJUR
		16	KOTA TASIKMALAYA
		17	KAB. CIREBON
		18	KOTA BANDUNG
		19	KAB. GARUT
		20	KOTA SUKABUMI
		21	KAB. SUKABUMI
13	JAWA TENGAH	1	KOTA PEKALONGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		2	KAB. REMBANG
		3	KAB. KEBUMEN
		4	KAB. CILACAP
		5	KAB. DEMAK
		6	KAB. PURWOREJO
		7	KOTA MAGELANG
		8	KAB WONOGIRI
		9	KAB. BREBES
		10	KAB. PEMALANG
		11	KAB. GROBOGAN
		12	KAB. SRAGEN
		13	KAB. TEGAL
		14	KAB. SEMARANG
		15	KAB. BOYOLALI
		16	KAB. WONOSOBO
		17	KAB. BANYUMAS
		18	KOTA SEMARANG
		19	KAB. TEMANGGUNG
		20	KAB. MAGELANG
		21	KAB. KENDAL
		22	KAB. KLATEN
		23	KOTA SURAKARTA
		24	KAB. SUKOHARJO
14	D.I YOGYAKARTA		
		1	KAB. BANTUL
		2	KAB. GUNUNGKIDUL
		3	KAB. KULON PROGO
		4	KAB. SLEMAN
15	JAWA TIMUR		
		1	KAB. PONOROGO
		2	KAB. PACITAN
		3	KAB. TRENGGALEK
		4	KAB. BANGKALAN
		5	KAB. SIDOARJO
		6	KAB. JEMBER

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		7	KAB. BLITAR
		8	KAB. TULUNGAGUNG
		9	KAB. JOMBANG
		10	KAB. BONDOWOSO
		11	KAB. MAGETAN
		12	KAB. NGAWI
		13	KAB. MADIUN
		14	KAB. NGANJUK
		15	KAB. MOJOKERTO
		16	KAB. LUMAJANG
		17	KOTA MALANG
		18	KOTA MOJOKERTO
		19	KAB. TUBAN
		20	KAB. PROBOLINGGO
		21	KAB. KEDIRI
		22	KAB. SUMENEP
		23	KAB. MALANG
		24	KAB. PASURUAN
		25	KAB. LAMONGAN
16	BALI		
		1	KAB. BULELENG
		2	KAB. TABANAN
		3	KAB. KLUNGKUNG
		4	KAB. BANGLI
		5	KAB. JEMBRANA
		6	KAB. KARANGASEM
17	KALIMANTAN BARAT		
		1	KAB. SAMBAS
		2	KAB. BENGKAYANG
		3	KAB. SANGGAU
		4	KOTA SINGKAWANG
		5	KAB. KUBU RAYA
		6	KAB. KAPUAS HULU
		7	KAB. KETAPANG
		8	KAB. KAYONG UTARA

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		9	KAB. MELAWI
		10	KAB. MEMPAWAH
		11	KAB. SINTANG
		12	KAB. SEKADAU
		13	KAB. LANDAK
		14	KOTA PONTIANAK
18	KALIMANTAN TENGAH		
		1	KAB. KATINGAN
		2	KAB. KAPUAS
		3	KOTA PALANGKA RAYA
		4	KAB. PULANG PISAU
		5	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
		6	KAB. MURUNG RAYA
		7	KAB. BARITO SELATAN
		8	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
		9	KAB. LAMANDAU
		10	KAB. SUKAMARA
		11	KAB. SERUYAN
		12	KAB. BARITO UTARA
		13	KAB. BARITO TIMUR
		14	KAB. GUNUNG MAS
19	KALIMANTAN TIMUR		
		1	KAB. KUTAI TIMUR
		2	KAB. KUTAI KARTANEGARA
		3	KOTA SAMARINDA
		4	KAB. PASER
		5	KAB. KUTAI BARAT
		6	KAB. BERAU
		7	KAB. PENAJAM PASER UTARA
20	KALIMANTAN SELATAN		
		1	KAB. TANAH BUMBU
		2	KAB. BANDAR
		3	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
		4	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
		5	KAB. KOTABARU

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		6	KOTA BANJARMASIN
		7	KAB. TABALONG
		8	KAB. TANAH LAUT
		9	KAB. BARITO KUALA
		10	KAB. TAPIN
21	KALIMANTAN UTARA		
		1	KAB. BULUNGAN
		2	KAB. MALINAU
		3	KAB. NUNUKAN
		4	KAB. TANA TIDUNG
		5	KOTA TARAKAN
22	SULAWESI UTARA		
		1	KAB. MINAHASA SELATAN
		2	KAB. BOLAANG MONGONDOW
		3	KOTA MANADO
		4	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
		5	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
		6	KAB. KEP. SANGIHE
		7	KAB. KEP. SIAU TAGULANG BIARO
		8	KAB. MINAHASA
		9	KOTA KOTAMOBAGU
		10	KOTA TOMOHON
		11	KAB. MINAHASA UTARA
		12	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
		13	KAB. MINAHASA TENGGARA
23	GORONTALO		
		1	KAB. GORONTALO
		2	KOTA GORONTALO
		3	KAB. BONE BOLANGO
		4	KAB. GORONTALO UTARA
		5	KAB. BOALEMO
		6	KAB. POHUWATO
24	SULAWESI TENGAH		
		1	KAB. DONGGALA
		2	KAB. BANGGAI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		3	KAB. SIGI
		4	KOTA PALU
		5	KAB. BUOL
		6	KAB. PARIGI MOUTONG
		7	KAB. MOROWALI
		8	KAB. BANGGAI LAUT
		9	KAB. POSO
		10	KAB. TOJO UNA-UNA
		11	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
		12	KAB. MOROWALI UTARA
		13	KAB. TOLI-TOLI
25	SULAWESI TENGGARA		
		1	KAB. BOMBANA
		2	KAB. MUNA
		3	KAB. KONAWE KEPULAUAN
		4	KAB. KONAWE
		5	KAB. WAKATOBI
		6	KAB. KOLAKA
		7	KAB. BUTON TENGAH
		8	KAB. BUTON
		9	KAB. BUTON SELATAN
		10	KAB. BUTON UTARA
		11	KAB. KONAWE UTARA
		12	KAB. MUNA BARAT
		13	KAB. KONAWE SELATAN
		14	KOTA BAUBAU
		15	KAB. KOLAKA TIMUR
		16	KAB. KOLAKA UTARA
		17	KOTA KENDARI
26	SULAWESI SELATAN		
		1	KOTA MAKASSAR
		2	KAB. TAKALAR
		3	KAB. JENEPONTO
		4	KAB. TANA TORAJA
		5	KAB. LUWU TIMUR

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		6	KAB. KEPULAUAN SELAYAR
		7	KAB. BULUKUMBA
		8	KAB. LUWU
		9	KAB. LUWU UTARA
		10	KOTA PALOPO
		11	KAB. BANTAENG
		12	KAB. GOWA
		13	KAB. WAJO
		14	KAB. PINRANG
		15	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		16	KAB. MAROS
		17	KAB. TORAJA UTARA
		18	KAB. BONE
27	SULAWESI BARAT		
		1	KAB. MAMASA
		2	KAB. MAMUJU
		3	KAB. MAJENE
		4	KAB. MAMUJU UTARA
		5	KAB. POLEWALI MANDAR
		6	KAB. MAMUJU TENGAH
28	NUSA TENGGARA BARAT		
		1	KAB. LOMBOK TIMUR
		2	KAB. SUMBAWA BARAT
		3	KAB. DOMPU
		4	KAB. LOMBOK UTARA
		5	KAB. LOMBOK TENGAH
		6	KAB. LOMBOK BARAT
		7	KAB. SUMBAWA
		8	KOTA MATARAM
		9	KAB. BIMA
		10	KOTA BIMA
29	NUSA TENGGARA TIMUR		
		1	KAB. KUPANG
		2	KAB. MALAKA
		3	KAB. TIMOR TENGAH UTARA

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		4	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
		5	KAB. BELU
		6	KAB. ENDS
		7	KAB. ROTE NDAO
		8	KAB. MANGGARAI TIMUR
		9	KAB. NGADA
		10	KAB. ALOR
		11	KAB. LEMBATA
		12	KOTA KUPANG
		13	KAB. MANGGARAI
		14	KAB. FLORES TIMUR
		15	KAB. NAGEKEO
		16	KAB. SABU RAIJUA
		17	KAB. SIKKA
		18	KAB. SUMBA BARAT
		19	KAB. SUMBA TENGAH
		20	KAB. SUMBA TIMUR
		21	KAB. MANGGARAI BARAT
		22	KAB. SUMBA BARAT DAYA
30	MALUKU		
		1	KOTA TUAL
		2	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
		3	KAB. MALUKU TENGAH
		4	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
		5	KAB. BURU
		6	KAB. MALUKU BARAT DAYA
		7	KOTA AMBON
		8	KAB. MALUKU TENGGARA
		9	KAB. BURU SELATAN
		10	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
		11	KAB. KEP. ARU
31	MALUKU UTARA		
		1	KAB. KEPULAUAN SULA
		2	KOTA TIDORE KEPULAUAN
		3	KAB. HALMAHERA BARAT

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		4	KAB. HALMAHERA UTARA
		5	KAB. PULAU MOROTAI
		6	KAB. HALMAHERA SELATAN
		7	KAB. HALMAHERA TENGAH
		8	KOTA TERNATE
		9	KAB. HALMAHERA TIMUR
32	PAPUA	1	KAB. TOLIKARA
		2	KOTA JAYAPURA
		3	KAB. JAYAPURA
		4	KAB. YALIMO
		5	KAB. MAMBERAMO TENGAH
		6	KAB. LANNY JAYA
		7	KAB. KEEROM
		8	KAB. DOGIYAI
		9	KAB. BIAK NUMFOR
		10	KAB. DEIYAI
		11	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
		12	KAB. WAROPEN
		13	KAB. KEP. YAPEN
		14	KAB. MERAUKE
		15	KAB. JAYAWIJAYA
		16	KAB. PANIAI
		17	KAB. YAHUKIMO
		18	KAB. BOVEN DIGOEL
		19	KAB. MIMIKA
		20	KAB. ASMAT
33	PAPUA BARAT	1	KAB. MANOKWARI
		2	KOTA SORONG
		3	KAB. MAYBRAT
		4	KAB. SORONG
		5	KAB. SORONG SELATAN
		6	KAB. TELUK WONDAMA
		7	KAB. MANOKWARI SELATAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	
		8	KAB. TAMBRAUW
		9	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
		10	KAB. TELUK BINTUNI
		11	KAB. FAKFAK
		12	KAB. KAIMANA
		13	KAB. RAJA AMPAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO